

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tipe Negara kesejahteraan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas sekali tertuang dalam Pancasila yang menjadi dasar dari Negara yang harus diwujudkan dalam pembangunan di Indonesia. Salah satu wujudnya dalam hal pengembangan daerah baik di pemerintahan maupun masyarakatnya. Dengan dilakukan pembangunan daerah yang merata untuk menjamin kehidupan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan di negara berkembang seperti di Indonesia menekankan pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam paradigma pertumbuhan, peran pemerintah adalah menyusun perencanaan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Paradigma pembangunan yang hanya mengacu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan telah terbukti rentan terhadap masalah-masalah sosial.<sup>2</sup> Selain itu, perencanaan pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan politik, dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008), h. 35

<sup>2</sup> Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 14

daerah. Di era otonomi saat ini, setiap daerah dituntut untuk lebih mandiri, sehingga berbagai perintisan kearah tujuan dan kesuksesan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh setiap pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, peningkatan percepatan pembangunan, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik.<sup>4</sup>

Pemberian otonomi kepada daerah Kota/Kabupaten didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan atas dasar asas desentralisasi tersebut menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan suatu otonomi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kota/Kabupaten sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Muhammad Mujtaba Habibi, *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 59

Pemerintah daerah memiliki peran penting bagi kemaslahatan masyarakat di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola dalam membangun suatu wilayah. Pemerintah daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bertanggung jawab atas pembangunan di suatu daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.<sup>5</sup> Salah satu urusan dari sekian banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Seluma dalam melaksanakan pengembangan pembangunan daerah terutama pembangunan jalan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pembangunan infrastuktur jalan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan infrasuktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.<sup>6</sup> Jalan merupakan prasarana infrastuktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai jalur transportasi kendaraan darat atau pendistribusian barang dan jasa.<sup>7</sup> Ketersedian jumlah jalur jalan yang cukup dan dengan kondisi yang baik berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>6</sup> Edy Suryawardana, Dian Triyani, Analisis Dampak Pembangunan Infrasstruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Di Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17, Nomor 2, 2015

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk membuka daerah kurang berkembang untuk memacu daerah yang telah berkembang. Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat dan akan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Memperhatikan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Seluma sangat memprihatinkan terutama jalan poros Bengkulu-Seluma dan jalan-jalan sebagian Desa yang rusak. Jika melewati jalan tersebut maka terlihat adanya kerusakan jalan bukan hanya itu tetapi ternyata masyarakat sekitar sudah mempersoalkan masalah jalan yang berlubang dan masih ada jalan yang belum beraspal. Infrastruktur jalan ada yang sudah diperbaiki akan tetapi cuma ditambal bukan aspal baru sedangkan jalan-jalan di Desa masih banyak yang berlobang dan tanah, dan masih ada wilayah yang tidak menikmati adanya jalan yang beraspal.

Lebih mirisnya lagi Peraturan Daerah tentang pembangunan jalan desa di Kabupaten Seluma yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 Tahun Anggaran, dicabut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana

Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 Tahun Anggaran, dengan alasan bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Kontruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 Tahun Anggaran menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat terganggu, karena banyak kegiatan SKPD tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat tidak tersedianya dana bahwa dalam rangka menegakkan asas hukum terutama taat asas dan taat aturan dimana setiap peraturan yang telah ditetapkan dan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau tidak bisa dilaksanakan, wajib dicabut guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapannya.

Bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian secara seksama terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 ternyata tidak dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Seluma disebabkan tidak meratanya pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan fisik infrastruktur jalan dan jembatan bahwa program pembangunan dengan sistem Tahun jamak di Kabupaten Seluma sesungguhnya belum dapat diterapkan disebabkan dana anggaran yang ada di Kabupaten Seluma sangat terbatas sehingga dapat mengakibatkan stagnasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan sistem

Tahun jamak di Kabupaten Seluma menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang saat ini sedang disidik aparat penegak hukum yaitu Pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Untuk selengkapnya akan penulis paparkan jalan-jalan rusak yang ada di Kabupaten Seluma, yang pertama Desa Lubuk Resam, Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, Desa Sido Mulyo, Desa Tanjung Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Desa Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, Kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.<sup>8</sup>

Dari pemekaran tahun 2004 sampai sekarang jalan penghubung antara desa dimana jalan ini tidak layak lagi untuk dilalui. Demi menyalurkan hasil bumi dan kebutuhannya, masyarakat terpaksa harus melalujalan tersebut. Kerusakan jalan tersebut lebih diperparah lagi dengan tinggi curah hujan akhir-akhir ini yang menyebabkan jalan berlumpur dan berkubang. Masyarakat mengharapkan agar pemerintah memperhatikan jalan ini, karena jalan ini merupakan akses utama bagi masyarakat desa.

Pengembangan pembangunan jalan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kecelakaan. Sarana infrastuktur menjadi hal yang cukup penting untuk digunakan masyarakat akan tetapi mengingat infrastuktur jalan yang kurang memadai menjadikan terhambatnya pergerakan masyarakat. Salah satu contoh kecil

---

<sup>8</sup> <https://peraturanpedia.com/peraturan-daerah-kabupaten-seluma-nomor-3-tahun-2014/>, diakses pada 08 Juni 2023

dari akibat infrastuktur jalan yang kurang memadai yaitu keterlambatan proses rujukan pasien dari desa ke rumah sakit umum daerah, yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Pengembangan pembangunan jalan akan lebih mempermudah proses rujukan pasien ke rumah sakit umum daerah serta memberikan dampak yang baik bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Terkait dengan peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai perencanaan. Sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

Pada tataran implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya jalinan kerja sama daerah. Salah satu tujuan pembangunan jalan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Surah Al-Hasyr ayat 18*, (Bandung: Syamil Qur' an, 2011), h. 548

mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang layak setara dengan daerah-daerah dengan pendapatan yang tinggi. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya.

Rangkaian ayat di atas adalah memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok pada firman Allah tersebut dapat kita tafsirkan dan kita buktikan bahwa al-qur'an telah memperkenalkan teori perencanaan baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa intrpeksilah diri kalian sebelum kalian diintropeksi dan lihatlah amalan apa yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat.<sup>10</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata perhatikanlah mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya maka penulis tertarik mengangkat judul Peran

---

<sup>10</sup> Syaikh Ahafiyurrahman al-mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 36

Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Kajian *Siyasah Syar'iyah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma?
2. Untuk mengetahui Kajian *Siyasah Syar'iyah* terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.

- c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitin-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama skripsi Henrawan, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif *Siyasah*

Idariyah, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>11</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.<sup>12</sup>

Kedua skripsi Rahmad Kurniawan, Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalandi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Persamaan

---

<sup>11</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

<sup>12</sup> Henrawan, *Peran Bappeda Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa. Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>13</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.<sup>14</sup>

Ketiga skripsi Nirwana, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2015, dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

---

<sup>13</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

<sup>14</sup> Rahmad Kurniawan, *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Penyelenggaraan Perbaikan Jalandi Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar*, skripsi Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarig Kasim Riau

Poros Dan Jalan Desa. Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah terletak di Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>15</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.<sup>16</sup>

Kempat jurnal Edy Suryawardana, Dian Triyani, Jurnal: J. Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Juni 2015, dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang, persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penulis lebih membahas mengenai Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada Perbedaan penelitian dengan penulis ialah penulis membahas mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>15</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

<sup>16</sup> Nirwana, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Di Desa Su'rulangi Kecamatan Polongbangkengselatan Kabupaten Takalar*, skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar 2015

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>17</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seluma dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>18</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kabupaten Seluma, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

<sup>18</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian*,... h. 1

dengan obsrvasi awal, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah* masih banyak terjadi. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>19</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Informan yang akan peneliti wawancara adalah:

Tabel 1.1

No	Instansi/Masyarakat
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seluma
2	Staf Pemda Kabuapten Seluma
3	Tokoh Masyarakat

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h. 90

#### a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

##### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks mengenai prinsip karena buku teks berisi m-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181

mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>21</sup>Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
  - (2) Jurnal ilmiah.
  - (3) Artikel ilmiah
- 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan nagan Tema Penelitian yang dikaji yang berkaitan de.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

##### 1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

##### 2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *...an Hukum Peneliti* . ١٨٢

Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, (interviewer) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>22</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

<sup>23</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>24</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Kepatuhan Hukum, Teori Pemerintahan Daerah, Teori *Siyasah Syar'iyah*

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan

---

<sup>24</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h. 97

menguraikan secara sistematis tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Poros Dan Jalan Desa Di Kabupaten Seluma Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

